BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Objek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah Kabupten Bandung Barat

Pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun l999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh bapak H.U.Hatta Djati Permana. S.Ip mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu pimpinan DPRD / Ketua DPRD diketuai Bapak H.Obar Sobarna.S.Ip. Surat permohonan Bupati bernomor: 135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung no.5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRDterhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat No.135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain: Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan

/dihentikan, demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi (yang meliputi 3 Kecamatan) yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi tengah dan Kecamatan Cimahi utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 KM2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi, disamping itu jumlah penduduknya cukup banyak , berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4,3 Juta jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs.H.Endang Anwar, setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H.Zaenal Abidin , Drs. Ade Ratmadja , Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan., serta Forom Pemuda Bandung Barat yang dipimpin

Eman Sulaeman SE. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, untuk menyamakan visi misi perjuangan maka berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs.H.Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan DEKLARASI BERSAMA untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi DAERAH OTONOM terpisah dari Kabupaten Bandung , deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003 Naskah Deklarasi dibacakan dan ditanda tangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi keberbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab.Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI. Sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No12.tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat

Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs.H.Tjatja Kuswara ,SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs.H.Abubakar M.Si dan Drs.Ernawan Natasaputra hasil pemilihan langsung dilantik pada tanggal 17 juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan, Lc atas nama Presiden. (Drs. Ade Ratmadja. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara. Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung.

4.1.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat

Visi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat: "Mewujudkan masyarakat yang cerdas, rasional, maju, agamisdan sehat berbasis pada pengembangan dan pemberdayaan potensi wilayah."

CERDAS mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat baik sumber daya aparatur maupun masyarakat harus:

1. Memiliki kualitas, kompetensi, keterampilan dan menguasai informasi.
2. Produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif.
3. Jujur, beretika dan mempunyai integritas serta memiliki kepedulian sosial.

RASIONAL mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus sesuai dengan kondisi yang ada, termasuk pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya melalui indikator capaian kinerja yang terukur;

MAJU mengandung pengertian bahwa seiring dengan bertambahnya waktu maka Kabupaten Bandung Barat harus terus maju, bertambah baik dan mengalami peningkatan di semua aspek kehidupan;

AGAMIS mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

SEHAT mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik;

PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH Merupakan upaya Kabupaten Bandung Barat untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mengandung makna suatu kondisi yang bergerak dinamis kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, diiringi peningkatan pendapatan perkapita di semua lapisan, dengan laju inflasi yang terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi yang mendorong permintaan barang dan jasa dan pada gilirannya produksi meningkat dan memberikan multiplier pada penciptaan kesempatan kerja, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan kemiskinan yang mengedepankan kearifan lokal akan mendorong terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Maju bersama juga mengandung makna perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar golongan maupun wilayah, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat.

PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH merupakan usaha yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat membantu masyarakat dalam upaya memperoleh daya untuk mengambil keputusan,serta menentukan tindakan mengurangi efek hambatan ekonomi dan sosial. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk menggunakan daya yang dimiliki individu, kelompok, ataupun komunitas untuk membentuk masa depan yang lebih baik, meliputi: Tumbuhnya ekonomi, terciptanya pemerataan pembangunan dan pendapatan, berkembangnya kehidupan sosial budaya yang konstruktif; tersedianya infrastruktur wilayah yang memadai, meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Misi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat. Yaitu Pembangunan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara konsisten dan berkelanjutan di semua tingkatan yang tercermin dari berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan keuangan daerah, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan proporsional, efektif, transparan serta profesional.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Yaitu pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh

meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Yaitu Membangun ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan. Yaitu meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas sarana prasaran dan utilitas lainnya yang memiliki daya dukung lingkungan dan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial serta berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produksi, produktivitas, efisiensi dan mobilitas publik;

5. Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal. Yaitu Pembangunan yang mengedepankan keselarasan kehidupan agama, sosial dan kearifan lokal masyarakat Bandung Barat yang berkeadilan dengan menjamin toleransi, persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya luhur.

6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian wewenang secara proporsional

kepada pemerintahan desa, sesuai dengan semanagat otonomi desa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 45, baik dalam menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam pengambilan keputusan *(to give authority)* dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa *(to give ability or enable)* melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar masyarakat desa dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Hal ini menunjukan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

4.1.1.3 Letak Geografis Kabupaten Bandung Barat

Wilayah Administratif berdasarkan data, luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu 1.305,77 KM², terletak a]ntara 60º 41’ s/d 70º 19’ lintang Selatan dan 107º 22’ s/d 108º 05’ Bujur Timur. Mempunyai rata-rata ketinggian 110 M dan Maksimum 2.2429 M dari permukaan laut. Kemiringa wilayah yang bervariasi antara 0 – 8%, 8 – 15% hingga diatas 45%, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah barat: berbatasan dengan kabupaten Cianjur

Sebelah utara: berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

Selebah timur: berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.

Sebelah selatan: berbatasan dengan Selatan Kabupaten Badung dan Kabupaten Cianjur.

Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari: Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy,

Lembang, Sindangkerta, Cihampelas dan Rongga. Penggunaan lahan Eksisting Dilihat dari sisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, penggunaan lahan untuk budidaya pertanian merupakan penggunaan lahan terbesar yaitu 66.500,294 HA, sedangkan yang termasuk kawasan lindung seluas 50.150,928 HA, budidaya non peratanian seluas 12.159,151 HA dan lainnya seluas 1.768,654 HA.

Luas wilayah lindung di daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan isu kawasan bandung utara, disamping itu dilihat dari kondisi fisik geografis posisi wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai kurang menguntungkan, hal ini dikarenakan terdiri dari banyak cekungan yang berbukit-bukit dan di daerah-daerah tertentu sangat rawan dengan bencana alam. Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Utara: Kecamatan Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur); Kecamatan Maniis, Darang, Bojong &, Kecamatan Wanayasa (Kab. Purwakarta);Kec. Sagalaherang, Jalancagak & Cisalak (Kab. Subang), dan Kab. Sumedang;

Timur: Kecamatan Cilengkrang, Kec. Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung); Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari (Kota Bandung); Kec. Cimahi Utara, Kec. Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan (Kota Cimahi);

Selatan: Kecamatan Ciwidey dan Rancabali (Kabupaten Bandung); Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur);

Barat: Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur).

4.1.1.4 Kecamatan Cisarua

Kecamatan cisarua merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Ptovinsi Jawa Barat. Cisarua sebuah kecamatan yang berpotensi dibidang pertanian dan perternakan, produk utamanya antara lain jamur, susu, tanaman palawija, dan sayur-sayuran. Cisarua memilki iklim yang sangat dingin. Kecamatan Cisarua terbagi menjadi 8 Kelurahan/Desa anatara lain Desa cipada, desa jambudipa, desa kertawangi, desa padaasih, desa pasirhalang, desa pasirlangu, desa sedangmekar, dan desa tugumukti.

Visi Kecamatan Cisarua "Mewujudkan pelayanan yang berkualitas, terorganisir, serius untuk menggapai prestasi (berobsesi). Misi dari Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat :

1. Memberikan produk pelayanan yang berkualitas.
2. Bekerja untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dalam kesatuan yang terorganisir.
3. Memberikan pelayanan secara benar dan serius dengan keramahan, senyum dan keakraban.

Keterlibatan Kecamatan Cisarua dalam Program keluarga harapan hanya membantu dalam menyediakan fasilitas tempat seperti ruang serbaguna Desa. tempat tersebut digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan juga tempat pencairan dana bantuan program keluarga harapan dinas sosial kabpaten bandung barat.

4.1.1.5 Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial. Kepala Dinas Sosial merupakan kedudukan tertinggi pada Dinas ini yang berkedudukan dibawah Bupati serta bertanggungjawab langsung pada Bupati melalu Sekertaris Daerah.

4.1.1.6 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

Visi Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat "Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Bandung Barat". Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat untuk menentukan rumusan kebijakan dan program di bidang sosial perencanaan untuk masa yang akan datang.

Makna kesejahteraan sosial dalam arti yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Maka Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat

dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Berdasarkan Visi tersebut Dinas Sosial mempunyai Misi sebagai berikut:

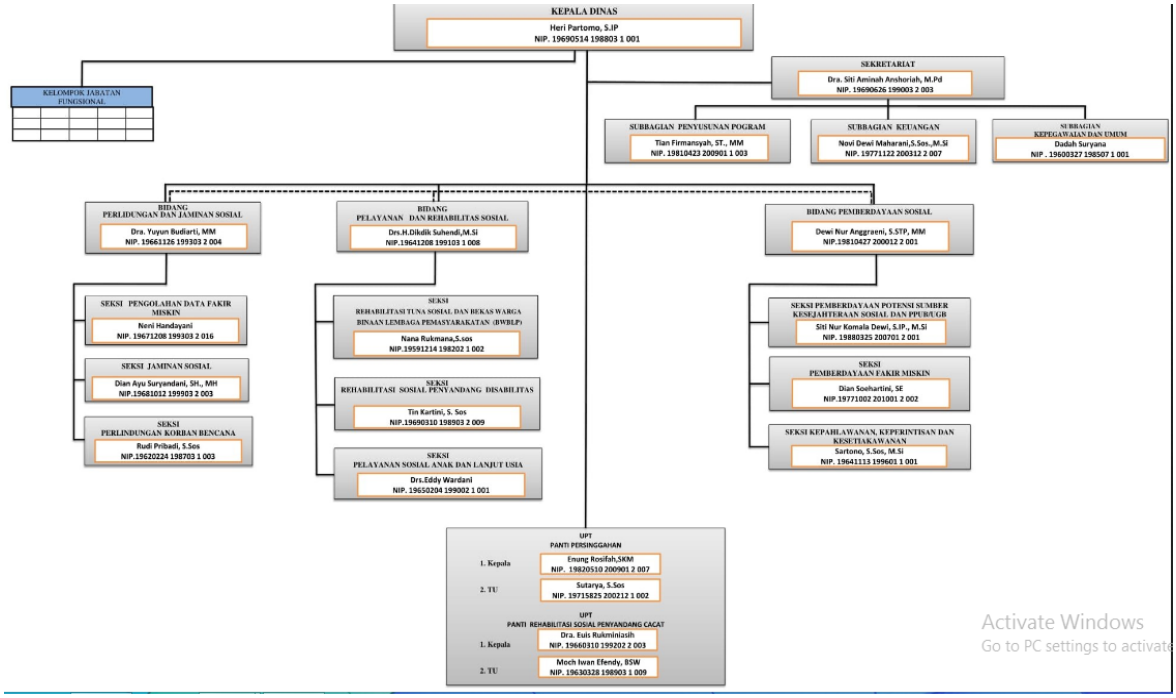
Misi Kesatu : Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas di bidang sosial.

Misi Kedua : Mewujdkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Misi Ketiga : Mewujudkan pengembangan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial.

4.1.1.7 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat



Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat 2018

Gambar diatas merupakan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas kemudian dibantu oleh Skretariat dan para stafnya. Kepala Dinas membawahi Sekretaris, kelompok jafung, bidang dan UPT, sedangkan skretaris membawahi tiga unsur yaitu Subag penyusunan program, subag keuangan, dan subag kepegawaian dan umum. Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat memiliki tiga (3) bidang diantaranya: Pertama Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang membawahi langsung seksi pengolahan data fakir miskin, seksi jaminan sosial, seksi perlindungan korban bencana. Kedua Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang membawahi langsung seksi rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan seksi pelayanan sosial anak dan lanjut usia. Ketiga Bidang Pemberdayaan Sosial yang membawahi langsung seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, seksi pemberdayaan fakir miskin, dan seksi kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan.

4.1.1.8 Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan Tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan.

Landasan Hukum pemberian Program Keluarga Harapan adalah:

1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
5. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Dasar hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah:

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
3. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".

4. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
5. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

Landasan hukum yang dipaparkan diatas merupakan acuan dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan agar kemudian dapat mensinergikan antara upaya penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Pusat, propinsi dan Kabupaten Karena penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil apabila dilakukan tanpa koordinasi dengan segala tingkat pemerintahan baik itu pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah.

Sasaran Program Keluarga Harapan diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta Program Keluarga Harapan didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar
6. Lansia usia 60 tahun dan penyandang disabilitas (diutamakan penyandang disabilitas berat).

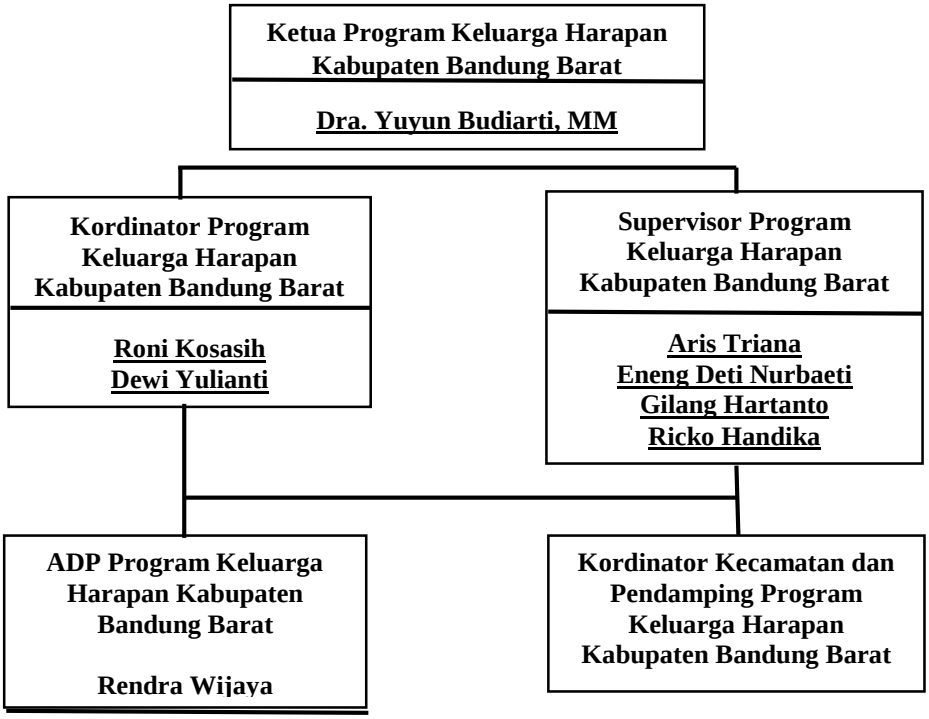
Sumber : Data Program Keluarga Harapan Kabupaten Bandung Barat, 2017

Program keluarga harapan merupakan program nasional yang dikelola oleh kementrian kemudian dibantu oleh Dinas Sosial bagian Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang kemudian juga dibantu oleh pelaksana Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah, peserta program keluarga harapan adalah rumah tangga sangat miskin yang memerlukan tenaga pendampingan. Pendamping program keluarga harapan direkrut oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan masyarakat penerima program dan membantu kelancaran program keluarga harapan.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH)

Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat



Sumber : Data Program Keluarga Harapan Kabupaten Bandung Barat (2017)

Tugas dan Fungsi SDM Program Keluraga Harapan :

A. Tugas Dan Kewajiban Koordinator Kabupaten/Kota

Tugas Koordinator Kabupaten/Kota PKH meliputi :

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota terkait implementasi PKH dan sinkronisasi dengan program bantuan komplementer lain;
2. Mengkoordinasikan, mengelola data dan melaporkan implementasi:
   a. Pertemuan awal dan validasi KPM
   b. Verifikasi dan komitmen KPM untuk berpartisipasi di dalam PKH
   c. Pemutakhiran data KPM untuk PKH
   d. Penyaluran bantuan sosial PKH
   e. Pengelolaan dokumen dan data terkait PKH
3. Bersama dengan Pekerja Sosial Supervisor mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2);
4. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan PKH di seluruh kecamatan lokasi tugasnya;
5. Mengkoordinasikan proses mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH di seluruh kecamatan lokasi tugasnya untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan program komplementer lainnya.

Kewajiban Koordinator Kabupaten/Kota PKH meliputi :

1. Membuat rencana kerja implementasi PKH di tingkat kabupaten/kota dan disampaikan kepada Koordinator Wilayah;

2. Memastikan seluruh Pendamping Sosial, Asisten Pendamping Sosial dan Administrator Pangkalan Data PKH memiliki tingkat kapabilitas yang memadai melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan;
3. Memastikan kehandalan Sistem Informasi PKH (SimPKH) di tingkat Kabupaten/Kota, melalui pengawasan pada penggunaan aplikasi SimPKH di setiap kecamatan, memastikan pemutakhiran data secara berkala, kehandalan perangkat keras dan perangkat lunak, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk pemeliharaan dan perbaikan;
4. Memastikan penyelesaian seluruh isu, keluhan dan kasus dan melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi terkait PKH dan program komplementer lain di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau pemantapan yang diselengarakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh Dinas/Instansi Sosial Pelaksana PKH;
6. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Operasional PKH dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;

Bertanggung jawab dan melaporkan realisasi pelaksanaan PKH kepada Koordinator Wilayah.

B. Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial Supervisor

1. Monitoring pelaksanaan P2K2, antara lain:
   a. Membahas rencana pelaksanaan P2K2 dengan pendamping lain
   b. Membahas pelaksanaan langkah-langkah setiap sesi P2K2

c. Membahas catatan dan laporan pendamping.
d. Membuat catatan dan laporan
e. Membahas isu-isu/kesulitan dalam pelaksanaan P2K2
f. Memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan terkait pengasuhan dan pendidikan, perlindungan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial
g. Membahas materi P2K2 yang sesuai dengan kebutuhan KPM
h. Mendiskusikan kesulitan dalam memfasilitasi P2K2
i. Mengurangi beban psikologis dalam pelaksanaan P2K2 dan relasi dengan KPM dan pelaksana PKH lainnya
j. Memfasilitasi kegiatan P2K2 bersama pendamping

2. Manajemen Kasus
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat
4. Media Informasi dan Promosi

C. Tugas dan kewajiban Administrator Pangkalan Data

Tugas Administrator Pangkalan Data Kabupaten/Kota PKH, meliputi:

1. Menerima data dan formulir terkait validasi calon KPM PKH, verifikasi komitmen KPM PKH, dan pemutakhiran KPM PKH dari Direktorat JSK dan/atau Dinas Sosial Provinsi dan mendistribusikan kepada seluruh Pendamping Sosial;
2. Menerima dan memverifikasi data hasil validasi, hasil pemutakhiran, hasil verifikasi, dan realisasi penyaluran bantuan PKH dari seluruh Pendamping Sosial;

3. Melakukan input dan mengelola data hasil validasi, hasil pemutakhiran, hasil verifikasi, dan realisasi penyaluran bantuan PKH ke dalam SimPKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memberikan bantuan teknis kepada Pendamping Sosial terkait penggunaan dan penanganan keluhan dan permasalahan terkait SimPKH;
5. Menyiapkan kebutuhan data dan administrasi kegiatan PKH bagi para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota, wilayah, atau regional;
6. Mengadministrasikan di tingkat kabupaten/kota proses mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer

Kewajiban Administrator Pangkalan Data Kabupaten/Kota PKH, meliputi :

1. Membuat rencana kerja dan disampaikan kepada Koordinator Kabupaten/Kota;
2. Memastikan kelancaran penggunaan aplikasi SimPKH di setiap kecamatan, memastikan pemutakhiran data secara berkala, kehandalan perangkat keras dan perangkat lunak, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk pemeliharaan dan perbaikan;
3. Memastikan kelengkapan dan validitas data/dokumen hasil validasi calon KPM PKH, hasil pemutakhiran data KPM PKH, hasil verifikasi komitmen, realisasi penyaluran bantuan PKH serta data/dokumen PKH lainnya yang diterima dari seluruh Pendamping Sosial PKH;

4. Memastikan penyelesaian seluruh isu, keluhan dan kasus dan melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi terkait PKH dan program komplementer lain di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau pemantapan yang diselengarakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh Dinas/Instansi Sosial Pelaksana PKH;
6. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Operasional PKH dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;

Bertanggung jawab dan melaporkan realisasi pelaksanaan PKH kepada Koordinator Kabupaten/Kota.

D. Tugas dan fungsi Pendamping Sosial

1. Menyelengarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH;
2. Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya;
3. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;
4. Memfasilitasi akses kepada layanan pendidikan, layanan kesehatan dan layanan kesejahteraan sosial kepada anggota keluarga KPM PKH;
5. Memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan KPM PKH;

6. Melakukan pendampingan KPM PKH untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan;
7. Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh KPM PKH;
8. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk mendapatkan bantuan PKH dan bantuan dari program-program komplementer, meliputi KKS, KIS, KIP, KUBE/UEP, RASTRA, Rumah Tinggal Layak Huni, Subsidi Energi, serta bantuan dari program komplementer lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Pendamping Sosial berkewajiban :

1. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Umum PKH dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial;
2. Melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan, UPT Pendidikan dan UPT Kesehatan terkait dengan pelaksanaan PKH di lokasi tugasnya;
3. Melakukan koordinasi dan membangun kemitraan dengan unsur-unsur di luar PKH termasuk unsur-unsur berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan KPM PKH di lokasi tugasnya;

4. Melakukan koordinasi dengan petugas penyedia layanan pendidikan dan layanan kesehatan terkait pelaksanaan verifikasi komitmen KPM PKH;
5. Melakukan koordinasi dengan petugas bayar terkait pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di lokasi tugasnya;
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Koordinator Kabupaten/Kota dan bekerjasama dengan Operator PKH tingkat Kabupaten/Kota dan Pendamping Sosial PKH lain di lokasi tugasnya;
7. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan bimbingan teknis tentang PKH yang diselengarakan oleh Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota Pelaksana PKH;
8. Membantu Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan dan pelaporan terkait dengan program-program perlindungan dan jaminan sosial serta program penanggulangan kemiskinan;
9. Bertanggung jawab terhadap capaian target dan kualitas pelaksanaan PKH di lokasi tugasnya;

Melakukan pencatatan dan pembuatan laporan kegiatan pendampingan PKH secara periodik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Input dalam Program Keluarga Harapan Dinas sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Input merupakan suatu dasar yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau sebagai rencana dari awal dibentuknya suatu kegiatan yang kemudian diolah kembali menjadi sebuah informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan bagi Dinas Sosial, Program Keluarga Harapan maupun bagi masyarakat Kecamatan Cisarua yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan diterapkan dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Cisarua yang masih mengalami kehidupan yang kurang layak dalam kehidupan sehari-hari.

Program Keluarga Harapan diadakan karena memiliki tujuan yang sudah direncanakan yaitu tujuan dalam jangka pendek dimana program ini diharapakan dapat mengurangi beban dari keluarga RTSM atau rumah tangga sangat miskin khususnya di Kecamatan Cisarua dalam kesehariannya, sedangkan tujuan program dalam jangka panjang yaitu diharapkan dapat mengurangi keluarga RTSM bahkan memutus keluarga RTSM sehingga tidak ada lagi keluarga yang dikategorikan sebagai keluraga RTSM tersebut, sehingga generasi berikutnya tidak terjebak dalam kehidupan yang kurang layak bahkan keluar dari zona kemiskinan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam mengatasi hal tersebut program keluarga harapan memiliki rencana yaitu membedakan atau membagi kedalam tiga kategori penerima bantuan yaitu program keluarga harapan reguler yang ditujukan untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu

menyusui, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah dari SD sampai SMP. Program keluarga harapan reguler tersebut merupakan salah satu penerapan atau dasar dari tujuan jangka panjang yaitu untuk memutus rantai kemiskinan dengan menyelamatkan generasi penerus dan memberikan kehidupan yang layak serta pendidikan hal tersebut merupakan salah satu cara agar dapat memberikan masa depan yang cerah bagi anak dari RTSM khususnya masyarakat Kecamatan Cisarua sehingga dapat mewujudkan tujuan jangka panjang dari diadakannya program keluarga harapan.

Program keluarga harapan disabilitas berat merupakan salah satu bantuan program keluarga harapan yang dimana penerimanya merupakan masyarakat yang meiliki keterbatasan secara fisik dan mental. Masyarkat yang ada di Kecamatan Cisarua tersebut dalam keseharinnya tidak bisa melakukan aktifitas seperti masyarakat pada umumnya karena memiliki keterbatasan tersebut, maka dari itu program keluarga harapan memberikan bantuan khusus bagi masyarkat disabilitas agar dapat berkecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Program Keluarga Harapan lanjut usia merupakan bantuan yang diberikan kepada penerima dengan usia yang sudah tidak produktif sekitaran 60 tahun. Program ini diberikan kepada lansia karena diumur yang tidak produktif masyarakat tersebut sudak tidak memiliki lapangan kerja dan tidak mampu bersaing dengan masyarkat yang lebih muda karena faktor usia, sehingga sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun input dari program keluarga harapan Dinas Sosial Kabuapaten Bandung Barat khususnya di Kecamatan Cisarua berupa fasilitas fisik, material, modal, dan

sumberdaya manusia.berikut penjelasan mengenai input dari efektivitas program keluarga harapan.

4.2.1.1 Fasilitas Fisik yang menunjang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Fasilitas merupakan suatu sarana atau alat yang mempunyai fungsi untuk membantu atau mempermudah sesuatu yang dikerjakan agar dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Fasilitas tersebut dapat membuat pengaruh yang cukup besar terhadap sesuatu yang dikerjakannya, fasilitas tersebut bisa menunjang keberhasilan apabila fasilitas berfungsi dengan baik dan digunakan sesuai yang semestinya atau dapat berdampak sebaliknya apabila fasilitas yang menunjang pekerjaan kurang baik maka dapat menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai harapan. Fasilitas yang baik tetapi tidak digunakan dengan semestinya, maka hasilnya juga tidak akan sesuai dengan harapan. Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Cisarua juga memerlukan fasilitas yang baik serta aparatur yang kompeten agar dalam pelaksanaanya mampu menghasilkan tujuan yang diinginkan untuk merubah masyarakat Kecamatan Cisarua lebih baik dari sebelumnya.

Fasilitas fisik yang digunakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua oleh Dinas Sosial yaitu merupakan sarana yang dapat mempermudah aparatur dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan. Sarana yang dimaksud dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu

kendaraan yang digunakan aparatur untuk menuju lokasi dan sebaginya. Selain kendaraan sarana yang dipergunakan aparatur yang menjalankan Program Keluarga Harapan berupa komputer, laptop, infokus, printer dan alat lainnya yang berfungsi pada saat aparatur dari Program Keluarga Harapan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat di Kecamatan Cisarua. Lokasi pelaksanaan sosialisasi pada saat dilakukan pembagian bantuan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan sarana yang diperlukan oleh aparatur Program Keluarga Harapan agar pada pelaksanaanya dapat berlangsung secara kondusif dan aman serta memberikan kenyamanan pada saat dilaksanaknnya kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bandung Barat mengenai mengenai fasilitas fisik adalah sebagai berikut:

> "Fasilitas yang dipergunaakan untuk melaksanakan program ini memang belum maksimal, keterbatasan ruang kerja aparatur PKH misalnya, ruangan tersebut memang kurang layak bila dilihat dari segi ukuran tetapi lebih baik dari pada tidak ada sama sekali, permintaan ruangan sudah dilakukan namun belum ada ruangan pengganti yang disediakan selain itu tempat pelaksanaaan kegiatan dengan masyarakat juga kadang terkendala, karena biasanya kegiatan dilaksanakan di ruangan kecamatan atau desa masing-masing, tetapi apabila sedang digunakan, tempat diadakan kegiatan terkadang dilakukan di tempat tinggal masyarkat."(10-07-2018).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa jika dilihat dari ketersediaan sarana yang digunakan aparatur untuk melaksanakan Program Keluarga Harapan belum sesuai harapan, dilihat dari sarana yang digunakan aparatur sampai sarana untuk melaksanakan kegiatan masih belum maksimal dan bersifat fleksibel hal tersebut merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 4.3
Fasilitas Fisik Ruangan Aparatur Program Keluarga Harapan



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian, 2018

Berdasarakan dokumentasi diatas yang didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian dilapangan dapat dilihat fasilitas fisik yang dimiliki oleh apratur pelaksana Program Keluarga Harapan khususnya ruangan yang disediakan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Bandung Barat kurang memadai dilihat dari luas ruangan yang sempit membuat sarana beserta dokumen terlihat tidak tersusun rapi. Sarana lainnya seperti komputer yang dimiliki hanya tersedia 3 unit ditambah dengan laptop milik pribadi yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan program kelurga tersebut. Sedangkan daerah yang dikelola oleh aparatur Program Keluarga Harapan cukup banyak yaitu 16 Kecamatan dan sedangkan total aparatur pelaksana yaitu 114 orang yang terdiri dari pendamping, supervisor, kordinator lapangan dan ketua pkh, dengan jumlah aparatur yang sedemikian maka dibutuhkan kordinasi yang baik dalam mengguanakan tempat dan alat agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan kondusif.

Gambar 4.4

Sarana Kantor Kecamatan Cisarua



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian, 2018

Gambar diatas merupakan suasana masyarakat Keluarga Penerima Manfaat pada saat melakukan kegiatan pencairan dana tunai yang dilaksanakan diruangan serbaguna yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Cisarua. Terlihat dari dokumentasi diatas tempat yang tidak begitu besar digunakan untuk melakukan kegiatan yang diikuti oleh ratusan Keluarga Penerima Manfaat pada setiap pertemuannya. Kejadian tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa fasilitas fisik berupa sarana yang dimiliki untuk menjalankan Program Keluarga Harapan masih terskesan apadanya, sedangkan program ini merupakan program jangka panjang yang berarti kejadian diatas akan terus menerus terjadi selama program ini berlangsung. Kecuali pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat memberikan fasilitas tambahan agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan kondusif.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu masyarakat Keluarga Penerima Manfaat pada saat pelaksanakan kegiatan bantuan di Kecamatan Cisarua mengenai sarana tempat kegitan Program Keluarga Harapan. ”Kegiatan yang dilakukan terkadang di kantor kecamatan seperti sekarang, tapi kadang juga di kantor desa atau di rumah warga tidak tentu tempatnya.”(23-07-2018). Wawancara tersebut menjelaskan bahwa tempat pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan selalu berpindah-pindah hal tersebut mencerminkan bahwa sarana tempat yang mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan sangat minim. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sarana dengan aparatur yang bertugas di Kecamatan Cisarua:

> “Untuk pelaksanaan kegiatan kita memang lebih fleksibel tergantung kondisi dan kegiatan yang dilaksanakan apabila ruangan di kantor kecamtan tidak digunakan biasanya kami menggunakannya karena disana cukup luas alternatifnya adalah kantor desa dan apabila kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi biasanya dilaksanakan di rumah warga.”(23-07-2018).

Wawancara diatas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Cisarua mengenai sarana temapat pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua. Sarana tempat yang dimiliki masih berkesan fleksibel berpindah-pindah tergantung terhadap lokasi apabila lokasi utam kantor kecamtan tidak digunakan kegiatan dilaksanakan di tempat tersebut tetapi apabila tempat tersebut digunakan biasanya aparatur menggunakan tempat lainnya seperti kantor desa dan rumah warga yang cukup luas untuk di pergunakan pelaksanaan kegiatan Program Keluraga Harapan di Kecamatan Cisarua.

Gambar 4.5

Fasilitas Sarana Rumah Warga



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian, 2018

Dokumentasi tersebut merupakan dokumentasi dimana sedang ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan di Kecamtan Cisarua Kabupaten Bandung Barat yang berlokasi di salah satu rumah warga yang memiliki tempat cukup luas untuk menampung masyarakan penerima manfaat tersebut. Fasilitas fisik yang dimiliki untuk menjalankan program ini masih terlihat belum lengkap sehingga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut yang bisa menjadikan program ini tidak berjalan dengan efektif.

Hasil dari penelitian pada observasi dilapangan, fasilitas fisik yang dimiliki oleh aparatur Program Keluarga Harapan yang bertugas di Kecamatan Cisarua tidak memiliki sarana yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan maksimal. Sarana yang dimiliki apratur terkesan apa adanya, terutama sarana tempat aparatur dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan

program terhadap masyarakat penerima bantuan yang sering berpindah-pindah. Kegiatan tersebut terkadang dilakukan di ruangan serbaguna di Kantor Kecamatan Cisarua, tetapi tempat tersebut berkuran kecil tidak sebanding dengan masyarakat penerima bantuan yang mengikuti kegitan program yang dilakukan oleh aparatur Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua, bahkan kegiatan kerap dilakukan di tempat tinggal warga yang meiliki tempat cukup luas. Minimnya sarana tempat mengakibatkan aparatur sering membagi jadwal kegiatan dengan cara membatasi masyarakat dalam satu pertemuan dan membuat jadwal kegiatan ke jam yang berbeda agar masyarakat dapat mengikuti dan memahami apa yang disampaikan aparatur secara baik.

4.2.1.2 Material yang menunjang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamtan Cisarua.

Material merupakan bahan dasar yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan Program Keluarga Harapan khususnya di Kecamatan Cisarua agar dapat berjalan dengan efektif. Material yang dimaksud dapat berupa data masyarakat yang menerima bantuan di Kecamatan Cisarua dan teori untuk pelatihan aparatur serta masyarakat penerima bantuan di Kecamatan Cisarua. Material berupa data pengajuan masyarakat untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat merupakan material yang sangat penting dan harus diolah dengan baik agar masyarakat yang menerima bantuan dapat tepat sasaran.

Data penerima bantuan yang diperoleh oleh petugas lapangan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua berasal dari Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemisikinan (TNP2K) yang bersumber dari Pendapatan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Data tersebut didapatkan dari hasil pendataan calon keluarga miskin yang didapatkan pada saat sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Data tersebut kemudian diolah dan dilihat dari kriteria keluarga mana yang lebih layak mendapatkan bantuan dan menjadi Keluarga Penerima Manfaat.

Material yang berupa bahan dasar dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan juga dapat berupa teori yang berfungsi untuk memberikan ilmu terhadap aparatur seperti pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap aparatur Pelaksana Program Keluaraga Harapan dan teori untuk masyarakat penerima bantuan agara bantuan khususnya bantuan tunai yang diberikan terhadap Keluarga Penerima Bantuan dapat dipergunakan secara baik. Teori tersebut diperolah dari Kementrian Sosial Republik Indonesia dan dipelajari oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat beserta aparatur pelaksana Program Keluarga Harapan khususnya di Kecamatan Cisarua yang disampaikan dalam bentuk pelatihan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat dilapangan, peneliti menemukan beberapa temuan. Keluarga Penerima Manfaat sebagian besar memang memenuhi kriteria yang dapat dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), hal tersebut dapat dilihat dari tempat tinggal yang kurang layak serta pendapatan sehari-hari keluarga tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan, salah satunya sebabkan karena banyaknya anak yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang

cukup secara pendapatan dan tempat tinggalnya tetapi mendapatkan bantuan dan menjadi salah satu Keluarga Penerima Manfaat masih kerap ditemukan, sedangkan masyarkat yang layak mendapatkan bantuan tidak menjadi Keluarga Penerima Manfaat pada Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan peneliti menemukan salah satu penyebab, mengakibatkan masyarakat yang dikategorikan sebagai Rumah Tangga Sangat Misikin (RTSM) tetapi tidak menjadi salah satu Keluarga Penerima Manfaat. Hal tersebut diakibatkan karena kerapnya keluarga tersebut berpindah-pindah tempat atau mengontrak rumah yang berbeda-beda dari desa satu ke desa lainnya, kemudian keluarga tersebut tidak pernah melaporkan kepindahannya tersebut sehingga pada saat pengambilan data yang dilakukan oleh aparatur setempat dan Badan Pusat Statisitik (BPS) keluraga tersebut tidak terdata. Selain itu ada juga penyebab lainnya sehingga keluarga yang seharusnya mendapat bantuan menjadi tidak mendapat bantuan dikarenakan dokumen yang menjadikan kriteria agar menjadi Keluarga Penerima Manfaat tidak dimiliki, misalnya seperti keluarga yang tidak memiliki akta kelahiran anaknya sehingga anak tersebut tidak terdata bahkan ada keluarga yang tidak pernah memperbarui Kartu Keluarga yang dimilikinya, sedangkan keluarga tersebut anggota keluarganya sudah bertambah.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan aparatur Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua mengenai material:

> “Masyarakat yang masuk kriteria RTSM tetapi tidak terdata sebagai keluarga penerima manfaat kebanyakan pendatang, masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal tetap sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat selain itu dokumen yang menjadi peryaratanpun

tidak dimiliki seperti KK, surat keterangan domisili dan sebagainya."(13-07-2018).

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa material atau bahan dasar yang berupa data merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi khususnya pada pelaksanaan Efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua. Masyarakat Cisarua yang kurang memperhatikan dokumen atau data keluarganya seperti tidak melapornya pada saat berpindah tempat tinggal dengan membuat keterangan domisili, tidak diperbaruinya Kartu Keluarga, adanya anak yang belum memiliki akta kelahiran dan sebagainnya mengakibatkan syarat untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat tidak terpenuhi. Dalam hal ini perlunya peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai perwakilan pemerintah agar lebih aktif dalam mengawasi masyarakatnya sehingga masalah diatas tidak akan terjadi dan seluruh masyarakat yang dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Sangat misikin dapat menjadi Keluarga Penerima Manfaat dan dapat terwujudnya tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu mengurangi kemisikinan dan memberikan kehidupan yang layak pada seluruh masyarakat khusunya di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

4.2.1.3 Modal yang menunjang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang memiliki tujuan untuk membuat kesetaraan dalam hal kesejahtraan masyarakat yang dilihat dari sisi ekonomi. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan

langsung terhadap masyarakatannya yang dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang mampu jika dilihat dari segi ekonomi, maka dari itu pemerintah memberikan bantuan berupa bantuan tunai kepada masyarkat yang diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga yang kurang mampu tersebut. Program Keluarga Harapan tersebut tentu harus memiliki modal yang besar agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang di rencanakan. Berikut merupakan wawancara yang dilakukan dengan aparatur Program Keluarga Harapan mengenai modal.

> "Modal yang dipergunakan untuk dibagikan kemasyarakat penerima manfaat selalu lancar belum pernah ada kendala seperti tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan sampai nominal dana yang tidak sesuai sampai saat ini belum pernah terjadi."(10-07-2018).

Wawancara diatas mencerminkan kondisi yang baik dimiliki oleh Program Keluarga Harapan jika dilihat dari sisi modal. Berikut hasil wawancara dengan masyarkat Keluarga Penerima Manfaat di Kecamtan Cisarua: "uang yang dibagikan selalu datang sesuai yang dijanjikan baik waktunya atau jumlah uangnya."(23-07-18). Sejalan dengan pendapat aparatur bahwa dari segi finansial khususnya modal dan dana yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat tidak ada masalah yang terjadi yang dapat membuat tidak efektifnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

Modal merupakan suatu dasar yang bisa berupa finansial ataupun non finansial yang dipergunakan untuk menjalankan program seperti Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Cisarua oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Jumlah dana untuk Kecamatan Cisarua dalam Program Keluarga Harapan tahun 2017 ini berkisar Rp. 1.930.500.000. Nominal tersebut merupakan dana yang akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang dibagi kedalam

tiga kategori yaitu reguler, lansia dan disabilitas. Pencairan dana tersebut dilakukan setiap tahun yang dibagi menjadi empat kali pencairan setiap tahunnya.

Tabel 4.1

Pencairan Bantuan PKH di Kecamatan Cisarua tahun 2017

Tahap I	Januari	Rp. 500.000/orang
Tahap II	April	Rp. 500.000/orang
Tahap III	Juli	Rp. 500.000/orang
Tahap IV	Oktober	Rp. 390.000/orang
Total	**-**	Rp.1.890.000/orang

Sumber : Program Keluarga Harpan Kecamatan Cisarua

Data diatas merupakan dana yang diterima oleh setiap Keluarga Penerima Manfaat dari semua kategori baik reguler, lansia dan disabilitas di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Dana tersebut berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Sosial yang dibagi kesemua daerah disesuaikan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat, dana yang di dapatkan oleh daerah Kabaupaten Bandung Barat berkisar 14 miliyar yang dibagi ke 16 Kecamatan. Dana tersebut merupakan modal yang dapat membantu melancarkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kecamtan Cisarua.

Berdasarkan data diatas dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai modal untuk menjalan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bandung Barat khususnya Kecamatan Cisarua secara garis besar tidak ditemukan kendala. Dalam hal modal dana yang diterima oleh aparatur Program Keluarga Harapan di Cisarua selalu tepat waktu dan jumlahnya sesuai dengan yang

dianggarkan. Berdasarkan penjelasan tersebut yang didapatkan dari wawancara dengan supervisor yang bertugas di Kecamatan Cisarua jika dilihat dalam hal modal program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu menjadikan masyarkat Keluarga Penerima Bantuan menerima haknya sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah sehingga program ini dapat berjalan dengan efektif.

4.2.1.4 Sumber Daya Manusia yang menunjang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu komitmen atau tujuan yang telah dtetapkan. SDM adalah individu yang memiliki kehidupan sosial dan mempunyai berbagai kemampuan dan kebiasaan yang berbeda-beda disetiap idividunya. Kualitas SDM dapat berubah atau menigkat apabila SDM tersebut mempunyai kemauan untuk meningkatkan kemampuanya serta diberikan sarana seperti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dirinya agar mampu berkompetisi dengan SDM lainnya.

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua memiliki SDM berupa aparatur yang bertugas membantu menjalankan program ini agar dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dicapai apabila SDM yang dimiliki oleh Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua memiliki kemampuan yang dapat membantu menjalankan program ini dengan baik. SDM yang memiliki wewenang di Kecamatan Cisarua dalam Program Keluarga Harapan dibagi kebeberapa jabatan yaitu pendamping, operator, spv dan kordinator.

Tabel 4.2

SDM Program Keluarga Harpan di Kecamatan Cisarua

No	Jabatan	Jumlah
1	Kordinator	1
2	Supervisor	1
3	Apd/Operator	1
4	Pendamping	7

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Tabel diatas merupakan rincian SDM yang dimiliki oleh Program Keluarga Harapan yang bertugas di Kecamatan Cisarua. Jumlah SDM yang dimiliki untuk menjalankan program ini di Kecamatan Cisarua sangat terbatas hanya berjumlah 10 orang sedangkan jumlah masyarakat di Kecamatan Cisarua yang dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat berkisar 384 keluarga. Dari hal tersebut dapat dilihat dari segi kuantitas SDM yang dimiliki oleh Progaram Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua masih kurang memadai karena perbandingan jumlah yang cukup besar. Peneliti melakukan wawancara dengan aparatur Program Keluarga Harapan Kabupaten Bandung Barat mengenai SDM :

> "SDM yang dimiliki dalam pelaksanaan program keluarga harapan jika dilihat dari kualitasnya sudah cukup baik karena pada setiap jabatannya diisi oleh masing-masing pihak yang memang menguasai bidang tersebut, tapi jika dari kuantitas memang masih kurang rata-rata perkecamatan diisi oleh 7 sampai 10 apartur saja."(10-07-2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Program Keluarga Harapan mengenai kuantitas SDM yang dimiliki oleh Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua secara garis besar memang belum memadai hal tersebut menyebabkan jadwal yang dilakukan oleh SDM dalam melakukan kegiatan sangat

padat, terutama pada saat ada aparatur yang berhalangan hadir yang dapat merubah jadwal yang telah ditetapkan sehingga membuat kegiatan menjadi tidak berjalan dengan baik.

Tabel 4.3

Latar Pendidikan SDM Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua

No	Jabatan	Latar Pendidikan	Jumlah
1	Kordinator	Ilmu Politik	1
2	Supervisor	Ilmu Politik	1
3	Apd/Operator	Teknik Kompter	1
4	Pendamping	Ilmu Politik	7

Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian (2018)

Tabel diatas merupakan susunan jabatan dan latar pendidikan seluruh aparatur yang bertugas di Kecamatan Cisarua pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan. SDM yang dimiliki oleh Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua jika dilihat dari latar pendidikan memang sesuai dengan jabatan yang ditempatinya, hal tersebut merupakan dampak positif karena secara tidak langsung SDM yang dimiliki mempunyai kemampuan dibidangnya sesuai dengan jabatannya. Hal tersebut mampu memberikan dampak yang besar dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Ketua Program Keluarga Harapan Kabupaten Bandung Barat aparatur yang terlibat dalam program ini merupakan aparatur yang terpilih dan disesuaikan jabatan yang diisinya dengan kemampuan yang dimilikinya hal tersebut dimaksudakan agar pada saat menjadi

aparatur SDM terpilih tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal sehingga membantu pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakannya.

Penjalasan dan uraian diatas yang didapatkan peneliti pada saat observasi dilapangan dapat disimpulkan, bahwa SDM yang dimiliki oleh suatu kelompok khususnya Program Keluarga Harapan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya program tersebut. SDM merupakan faktor utama dalam bejalannya suatu program, maka dari itu SDM yang dipilih oleh Program Keluarga Harapan khususnya di Kecamtan Cisarua merupakan SDM yang terpilih dan ditempatkan pada jabat sesuai dengan kemampuang yang dimilikinya dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada pelaksanaan program ini.

Terbukti aparatur yang kompeten mampu memberikan perubahan terhadap masyarakat di Kecamtan Cisarua terutama dalam hal pola pikir masyarakat Keluarga Penerima Manfaat yang lebih maju dari sebelumnya. Pola pikir masyarakat yang sebelumnya memtingkan pekerja dan penghasilan tanpa memperdulikan pendidikan menjadi berbeda, sekarang masyarakat rata-rata berfikir lebih mendahulukan pendidikan karena dari pendidikan maka dapat menghasilkan pekerjaan yang layak dan menghasilkan ekonomi yang cukup untuk kehidupan keluarganya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas mengenai Input dalam Program Keluarga Harapan Dinasi Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua masih terdapat beberapa kendala yang dapat membuat program ini tidak berjalan

dengan efektif. Fasilitas fisik merupakan salah satu faktor yang berkendala khususnya dalam sarana yang digunakan oleh aparatur dan masyarakat masih belum memadai. Persyaratan yang dimiliki oleh keluarga RTSM yang tidak lengkap sehingga menyebabkan tidak terdaftarnya keluarga RTSM sebagai Keluarga Penerima Manfaat dan Peran Rukan Tetangga serta Rukun Warga yang kurang aktif merupakan salah satu penyebab tidak tepat sasaran bantuan yang diberikan pada Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua. Sedangkan jika dilihat dari sisi modal tidak ditemukan kendala yang berarti. Dari sisi kualitas SDM yang dimiliki cukup berkompeten dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan tetapi jika dilihat dari kuantitas masih berkendala karena minimnya jumlah apratur pada setiap Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

4.2.2 Proses Produksi dalam Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Proses Produksi dalam efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk menjalan program tersebut agar dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan dalam proses produksi yaitu komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi dan pengembangan aparatur. Tahapan - tahapan tersebut memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, apabila salah satu tahapan tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi tahapan lainnya dan dampaknya dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

Komunikasi merupakan salah satu tahapan dalam proses produksi dalam Efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lembang. Komunikasi memberikan dampak yang sangat besar dalam menyampaikan program ini kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Cisarua, komunikasi yang jelas dan akrurat dapat mempermudah masyarakat menerima iniformasi dan memhainya dengan baik sehingga tidak terjadi *miss comuninccation*. Pengambilan keputusan merupakan tahap selanjutnya dalam proses produksi Efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua. Pengambilan keputusan merupakan tahapan yang tidak kalah pentingnya karena pengambilan keputusan dapat mempengaruhi jalannya jalan program tersebut kedepannya.

Sosialisasi dalam proses produksi merupakan tahapan selanjutnya. Sosialisasi juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam berjalannya Program Keluarga Harapan di Kecamtan Lembang. Sosialisasi memiliki tujuan untuk menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan yang disampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan komunikasi yang baik dengan harapan masyarakat Cisarua dapat memahami dan menerapakan apa yang telah disampaikan oleh aparatur melalui sosialisasi tersebut. Sosialisasi bisa disampaikan melalui media atau disampaikan secara langsung dengan betuk kegiatan pelatihan.

Pengembangan aparatur termasuk kedalam tahapan proses produksi pada Efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua. Aparatur yang menjalanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan merupakan aparatur yang terpilih dan dianggap mampu menempati jabatan sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki oleh masing-masing aparatur. Kemampuan aparatur sangat menentukan terhadapa berjalan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua, itu sebabnya kemampuan aparatur wajib dikembangkan. Cara Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dalam mengembangkan aparatur yaitu dengan cara diberikan pendidikan daln latihan dengan tujuan kemampuan apratur dapat berkembang setelah mengikuti kegiatan tersebut.

4.2.2.1 Komunikasi yang menunjang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Informasi merupakan suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan kemudian diterima oleh komunikan dengan bentuk penyampaian secara lisan maaupun tulisan. Penyampaian pesan tersebut dapat dipahami apabila pesan disampaikan secara baik dan jelas terhadap penerimanya. Pesan yang disampaikan tersebut harus terbukti kebenarannya kerena apabila pesan yang disampaikan bersifat tidak valid maka akan menyebabkan *miss communication*, seperti halnya aparatur Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Cisarua.

Komunikasi yang dilakukan oleh aparatur Program Keluraga Harapan yang bertugas di Kecamatan Cisarua harus dapat di pahami oleh Keluarga Penerima Manfaat tersebut. Komunikasi yang baik dilakukan dengan menggunakan strategi agar dapat dipahmi sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh paratur pelaksana program tersebut. Aparatur pelaksana Program Keluarga harpan dalam menyampaikan pesan dituntut untuk menyesuaikan cara penyampaiannya dengan

kebiasan masyarakat Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Cisarua agar mudah dipahami. Pesan yang disampaikan oleh aparatur tidak akan berjalan dengan efektif apabila dilakukan melalui media informasi seperti website dan media elektronik lainnya karena mayoritas masyarakat Keluarga Penerima Manfaat kurang mengerti dengan media komunikasi elektronik maka dari itu aparatur harus menyampaikan komunikasi melalui media lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu kendala yang dialami oleh aparatur karena tanpa menggunakan media elektronik seperti internet pesan yang disampaikan menjadi lebih sulit diterima.

Masalah tersebut merupakan tugas dari aparatur, aparatur dituntut lebih kreatif dalam menyampaikan pesan yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan apratur mengenai komunikasi aparatur mengatakan

> "Apabila ada informasi yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua kami sebagai pelaksana program menyampaikan informasi tersebut dengan mengadakan sosialisasi dengan cara memberikan info terlebih dahulu kepada ketua dari kelompok masyarakat Keluarga Penerima Manfaat yang kemudian disampaikan oleh ketua kelompok tersebut kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat lainnya, setelah itu baru kami sampaikan informasi dengan bentuk sosialisasi langsung dalam pertemuan tersebut."(23-07-2018).

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh aparatur tersebut sampai saat ini masih berjalan dengan cukup efektif, terbukti dengan cara tersebut pada saat diadakan kegiatan pencairan dana tunai atau sosialsasi yang dilakukan oleh aparatur Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat Keluarga Penerima Manfaat seluruh masyarakat mengetahuinya dan datang pada tempat tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Hal tersebut membuktikan

komunikasi yang dilakukan aparatur dengan masyarkat Kecamatan Cisarua berjalan cukup baik dan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu masyarkaat penerima manfaat di Kecamatan Cisarua mengenai Komunikasi" Untuk informasi kami selalu dapat dari ketua kelompok kami atau dari aparatur secara langsung".(30-07-2018). Wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat selalu menerima informasi secara baik hal tersebut membuktikan bahwa komunikasi yang dilakukan antara apartur dengan masyarkat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan komunikasi yang baik dapat dilakukan tidak hanya dengan media elektronik, tetapi dengan cara lain seperti uraian diatas komunikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diatas. Aparatur Program Keluarga Harapan dapat menyusuaikan kebiasaan dari masyarakat Keluraga Penerima Manfaat dalam berkomunikasi, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara aparatur dengan masyarakat. Hal tersebut berdampak sangat baik terhadap kelangsungan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

4.2.2.2 Pengambilan Keputusan dalam Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Pengambilan keputusan merupakan salah satu tahap yang menentukan efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Csisarua, pengambilan keputusan merupakan bentuk dari tindakan yang diambil oleh aparatur dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh aparatur dapat mempengaruhi pelaksanaan Program Kelurga Harpan di Kecamatan Cisarua. Dalam mengambil suatu keputusan aparatur dituntut untuk mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi, maka dari itu pengambilan keputusan harus difikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu supaya menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aparatur Program Keluraga harapan di Kecamatan Cisarua berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu aparatur yaitu:

> "Kami dituntut mengambil keputusan misalanya dalam mengadakan pertemuan kegiatan Keluarga Penerima Manfaat, keterbatasan tempat yang tersedia menjadi salah satu penyebebab sulitnya kami mengambil keputusan dalam menentukan tempat pada saat mengadakan kegitan, salah satu cara adalah dengan membagi masyarakat Keluarga Penerima Manfaat kedalama beberapa kelompok dan dibagi menjadi beberpa pertemuan."(23-07-2018).

Berdasarkan penjelasan diatas yang didapat dari hasil wawancara dengan aparatur mengenai pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil dilakukan berdasarkan kondisi dan hal yang paling memungkinkan pada saat itu. Kondisi yang terjadi seperti dalam penjelasan diatas merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengambilan keputusan diatas berikut merupakan pendapat dari salah satu masyarakat yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat.

> "Pada saat diadakan kegiatan memang tempat yang digunakan selalu bebeda-beda, pada saat kegiatan diadakan di Kantor Kecamatan ruangan yang digunakan selalu penuh, berbeda pada saat pertemuan kegiatan dirumah warga yang dihadiri oleh satu atau dua kelompok saja."(30-07-2018).

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dari wawancara yang didapat peneliti dengan aparatur dan masyarkat dari Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Cisarua, dapat disumpulkan keputusan yang diambil oleh aparatur dalam menentukan tempat dan jadawal pada setiap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Cisarua tidak selalu menghasilkan dampak yang baik dalma keputusan tersebut, Keterbatasan sarana yang membatasi aparatur dalam mengambil keputsan sangat mempengaruhi dalam efektifitas pelaksanaan program tersebut, misalnya pada saat aparatur mengambil keputusan untuk mengadakan kegiatan di Kantor Kecamatan aparatur dapat menghemat waktu dan biaya karena kegiatan bisa dilaksanakan dalam satu hari dan pada tempat yang sama. Sedangkan apabila kegiatan dilaksanakan di rumah warga, waktu yang dibutuhkan apratur cukup banyak dan biaya yang dikeluarkanpun lebih besar dari sebelumnya.

Pengambilan keputusan apartur dalam efektifitas Program Keluarga Harapan menurut peneliti cukup baik karena dalam mengambil keputusan aparatur selalu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Penyebab pengambilan keputusan yang kurang baik dikarena keadaan yang disebabkan oleh faktor lainnya yaitu sarana yang dimiliki dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

4.2.2.3 Sosialisasi dalam Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Sosialisai merupakan suatu proses yang dilakukan dalam menyampaikan suatu pemahaman yang diberikan dalam bentuk secara lisan ataupun tulisan melalui berbagai media yang bertujuan agar dapat memberikan pemahaman kepada orang atau kelompok yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Kegiatan sosialisasi kerapa diberikan oleh aparatur Program Keluarga Harapan kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Cisarua, dimana dalam setiap pertemuan sosialisasi aparatur memberikan materi yang berbeda-beda yang berkaitan dengan program tersebut.

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua memiliki program khusus yang diadakan dalam bentuk sosialisasi yang disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). P2K2 dilaksanakan di salah satu rumah Keluarga Penerima Manfaat yang dihadiri oleh dua atau tiga kelompok Keluarga Penerima Manfaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

> "Kegiatan P2K2 merupakan kegiatan rutin yang disamapaikan dalam bentuk Sosialisasi, kegiatan tersebut merupakan kegitan sosialisasi yang menyampaikan tentang cara pengasuhan anak, pengelolaan ekonomi keluarga sampai membuat usaha, kesehatan keluarga, perlindungan anak, kesejahteraan sosial. Materi-materi tersebut disampaikan dengan harapan dapat merubah pola pikir serta merubah kesejahteraan masyarakat Keluarga Penerima Manfaat."(23-07-2018).

Gambar 4.6

Sosialisasi Kegiatan P2K2



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan uraian diatas tentang kegiatan P2K2 peneliti menyimpulkan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi Keluraga Penerima Manfaat karena dalam kegiatan tersebut masyarakat mendapatkan banyak ilmu dan manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain materi yang disampaikan aparatur juga sekaligus memberikan pelatihan khususnya dalam pengelolaan ekonomi keluarga sampai memulai usaha. Berdasarkan wawancara dengan masyarkat penerima manfaat:

> "Kami sangat terbantu atas sosialisasi kegitan P2K2 tersebut karena banyak ilmu yang didapatkan, misalnya dalam hal kesehatan, bagaimana cara hidup sehat yang baik, bagaimana cara memperbaiki pola makan atau perbaikan gizi, pentingnya pendidikan bagi anak dimulai dari usia dini, dan kami juga diberi tau bagimana cara mengelola keuangan sehari-hari menjadi lebih terencana dan tidak lagi mengeluarkan biaya untuk keperluan yang kurang penting."(30-07-2018).

Berdasarkan keterangan diatas masyarakat sangat terbantu oleh kegiatan tersebut, berkat sosialisasi yang diberikan oleh aparatur Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua masyarkat menjadi lebih memiliki pola pikir yang luas seperti mempertimbangkan kesehatan, memtingkan pendidikan untuk anaknya, melatih keterampilan yang dimiliki agar mudah mendapatakan pekerjaan bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri dan cara mengelola keungan secara rinci.

Gambar 4.7

Contoh Sosialsasi Kegiatan P2K2



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian, 2018

Gambar diatas merupakan salah satu contoh dari sosialisasi kegiatan P2K2 yang dilakukan aparatur Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua. Gambar diatas merupakan poster mengenai pengelolaan ekonomi keluarga, dapat dilihat disalah satu poster diatas menghimbau untuk berhenti berutang, karena pada dasarnya apabila kita memiliki hutang maka kemungkinan besar akan ada hutang selanjutnya untuk menutupi kebutuhan yang belum terpenuhi makan masyarakat Keluarga Penerima Manfaat dihimbau untuk

membuat pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk berutang. Sedangkan dalam poster satunya menjelaskan tentang mengelola pengeluaran sehar-hari secara rinci, karena dengan tidak mempertimbangkan hal-hal kecil suatu saat hal kecil tersebut dapat menjadi masalah besar. Poster tersebut mengajarkan untuk mempertimbangkan pengeluaran dan pendapatan dilihat dari hal yang paling kecil. Sosialisasi yang dilakukan oleh apratur selain menyampaikan tentang pengelolaan keungan, aparatur juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan, mementingakan pendidikan anaknya, mengasah keterampilan hingga menciptakan lapangan kerja sendiri.

Berdasarkan uraian diatas mengenai sosialisasi yang didapatkan oleh peniliti dari hasil wawancara dan observasi dilapangan, dapat disimpulkan sosialisasi merupakan salah satu faktor yang dapat merubah masyarakat terutama pola fikir masyarkat di Kecamatan Cisarua. Sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Cisarua oleh aparatur Program Keluarga Harapan berjalan dengan baik selain materi yang digunakan sangat berguna bagi masyarkat, penyampaian yang dilakukan oleh apratur kepada masyarakat dengan cara melakukan simulasi, cukup efektif sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan hal positif dalam mendukung pelaksanaan Efektifitas Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua dapat berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu masyarakat menjadi lebih pandai dalam mengelola keungan, menjaga kesehatan, mementingkan tingkat pendidikan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

4.2.2.4 Pengembangan Aparatur dalam Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Aparatur merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu instansi atau kelompok. SDM yang dimiliki tentu sangat menentukan kinerja dari suatu instansi atau kelompok tersebut, karena apabila memiliki SDM yang baik hal itu sangat menguntungkan bagi organisasi atau kelompok tersebut dan memungkinkan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan maksimal. Kompetensi yang dimiliki SDM tersebut agar dapat bekerja lebih efektif harus dapat dikembangkan.

Perubahan yang sangat cepat dalam pola hidup seseorang seiring berkembangnya zaman membuat persaingan semakin ketat. SDM dituntut untuk selalu mampu bersaing dan berfikir kreatif dalam berbagai kondisi dan situasinya, untuk mewujudkan hal tersebut SDM harus terus diberikan pelatihan dan pendidikan agar dapat terus berkembang khusunya dalam bidang yang ditempatinya. Aparatur yang dimiliki Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua juga dituntut untuk selalu berkembang sesuai dengan jabatan yang ditempatinya.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dengan aparatut Program Keluarga di Kabupaten Bandung Barat mengenai pengembangan aparaturnya adalah sebagai berikut: “Pengembangan aparatur Porgram Keluarga Harapan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan secara rutin yaitu satu tahun sekali aparatur wajib mengikuti pendidikan dan latihan yang diadakan sesuai dengan jabatan yang ditempatinya.”(10-07-2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam rangka mengembangkan kemampuan apraturnya, pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengadakan pendidikan dan latihan secara rutin dengan harapan aparaturnya dapat terus mengembangkan kemampuannya dari hasil mengikuti pelatihan dan pendidikan yang diadakan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal sesuai jabatnnya yang mendukung efektifitas Perogram Keluarga Harapan khususnya di Kecamatan Cisarua.

Gambar 4.8

Pendidikan dan Latihan Aparatur PKH 2017



Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian, 2018

Dokumentasi diatas merupakan salah satu pendidikan dan latihan aparatur Program Keluarga Harapan dalam rangka mengembangkan kinerja aparatur. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur yang mengikuti pelatihan tersebut mengemukakan, “Pelatihan yang diadakan untuk aparatur sangan berguna selain untuk meningkatkan kemampuan individu disisi lain juga dapat mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaa Program Keluarga Harapan.”(23-07-2018).

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengembangan aparatur dapat disimpulkan. Peneliti berpendapat dalam langkah mengembangkan aparatur Dinas Sosial sudah berperdan denganbaik, karena dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kinerja pada Program Keluarga Harapan, Dinas Sosial memberikan pelatihan dan pendidikan secara rutin agar aparatur senan tiasa berkembang dan dapat memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan Program Keluarga harapan. Ilmu yang didapatkan dari pelatihan tersebut apabila mampu diimplementasikan kedalam program dan dibagikan kepada masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Cisarua maka akan mendukung efektifitas Program Keluarga Harapan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua dilihat dari proses produksi seperti komunikasi, pengambila keputusan, sosialisasi dan pengembangan aparatur secara keseluruhan berjalan cukup efektif. Komunikasi yang disampaikan apratur mampu diterima dengan baik, sehingga penyampaian sosialisasipun dapat diterima dan dipahami oleh Keluarga Penerima Manfaat. Hal tersebut tidak luput dari peran apratur yang memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan program dan didukung dengan pengambilan keputusan yang tepat.

4.2.3 Hasil mengenai Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Hasil merupakan bentuk dari akhir suatu proses yang telah dilakukan, hasil tersebut dapat berupa jasa yang diberikan atapun produk yang dihasilkan dari serangkaian proses. Hasil yang baik didapatkan apabila produk dan jasa diproses secara maksimal sehingga dapat menghasilkan sesuatu sesuai yang diharapakan. Produk yang mendukung dalam efektifitas Progran Keluarga harapan contohnya kartu tanda anggota PKH sedangkan jasa yang diberikan seperti pelatihan yang diberikan oleh aparatur kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Produk tersebut apabila dimaksimalkan sesuai dengan fungsi dan kegunaanya makan akan mempermudah dan dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sebaliknya apabila produk yang ada tidak dapat dimaksimalkan maka produk tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Jasa diberikan kepada masyarakt sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparatur baik itu dalam menyampaikan kegitan ataupun pelatihan kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Cisarua.

4.2.3.1 Produk yang mendukung Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Produk merupakan suatu temuan yang dibuat dari proses data dan diolah sesuai dengan ketentuannya yang menghasilkan sebuah produk, dimana produk tersebut dapat berupa produk fisik maupun produk non fisik. Produk fisik yang dimiliki oleh Program Keluarga Harapan yaitu berupa kartu keluarga sejahtera dan

kartu elektronik PKH. Produk yang berupa kartu tersebut dimiliki oleh seluruh masyarakat Kecamtan Cisarua yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat. Kartu tersebut selain berfungsi untuk tanda masyarkat penerima bantuan, kartu tersebut juga memiliki kegunaan lain yaitu untuk mengambil bantuan tunai melalui atm yang bekerjasama dengan salah satu bank milik pemerintah.

Produk tersebut sangat membantu pelaksanaan Program Keluarga Harapan khususnya di Kecamatan Cisarua karena dapat mempermudah aparatur dalam memberikan bantuan dan dapat membuat efesien dalam hal waktu dan biaya. Produk fisik yang berupa kartu tersebut pertama diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2012 kartu tersebut berlaku selama 3 tahun apabila telah melampaui waktu tersebut, kartu tersebut akan diperbarui dengan kartu yang terbaru.

Produk non fisik yang dimaksud merupakan cara penggunaan dana yang didapatkan dari Program Keluarga Harapan tersebut sesuai dengan kategori masing masing. Produk non fisik bagi kategori reguler seperti ibu hamil, dana yang didapatkan tersebut diharapkan dapat membantu ibu hamil dalam meningkatkan pola hidupnya agar dapat memperkecil resiko kematian yang diakibatkan tidak terjaganya kandungan dan gizi ibu hamil tersebut, untuk menghindari hal tersebut diharapkan bantuan tunai yang diberikan dapat dipergunakan untuk memeriksa kandungan secara rutin serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Begitupun dengan kategori lainnya seperti anak sekolah, lansia dan disabilitas bantuan tersebut diharapkan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya seperti yang diarahkan aparatur Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu aparatur pelaksana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua mengenai produk adalah sebagai berikut:

> "Produk berupa fisik yang dimiliki oleh Program Keluarga Harapan berupa kartu, kartu tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat, sedangkan Produk non fisik yang kami berikan kepada Keluraga Penerima Manfaat merupakan pelatihan cara menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhannya serta keterampilan dengan harapaan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan menjadi memiliki kemampan sehingga dapat membuka jalan dalam membuat usaha ataupun bekerja."(23-07-2018).

Gambar 4.9

Contoh Bentuk Produk Fisik



Sumber : Dokumentasi Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diatas merupakan salah satu dokumentasi produksi fisik yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat, dimana kartu tersebut berfungsi sebagai kartu tanda bukti anggota penerima bantuan yang sah. Kartu ini juga berfungsi untuk pengambilan dan tunai di atm salah satu bank milik pemerintah. Produk non

fisik yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang berupa pelatihan dalam penggunaan dana sesuai dengan kategorinya serta keterampilan dirasa sangat bermanfaat karena dengan diadakannya kegiatan tersebut masyarakat berpeluang mendapatkan penghasilan baik dengan membuka usaha sendiri ataupun mencari pekerjaan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan masyarkat penerima manfaat di Kecamatan Ciasarua mengenai Produk,"produk fisik yang kami dapat hanya kartu, yang membuktikan kami sebagai anggota pkh, kartunya ada atmnya juga Cuma susah pakenya dan tempatnya jauh."(30-07-2018). Wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat memang menerima produk dari Program Keluarga Harapan, tetapi masyarakat tidak memaksimalkan produk tersebut karena alasan tidak mengerti cara penggunaannya dan jarak yang jauh menuju tempat pengambilaln dana tunai dengan atm.

Selain produk fisik yang tidak digunakan dengan maksimal, produk non fisik yang diberikan oleh aparatur Program Keluarga Harapan kepada masyarkat juga masih belum maksimal. Produk non fisik yang berupa penggunaan dana sesuai fungsinya belum berjalan dengan baik, misalnya ibu hamil yang diharapakan dapat memeriksa kandungannya secara rutin menggunakan uang yang didapatkan dari Program Keluarga Harapan tersebut pada kenyataanya masih digunakan untuk keperluan lainnya. Selain ibu hamil bantuan yang ditujukan kepada anak sekolah yang diharapkan dapat dipergunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan pendidikan pada kenyataanya digunakan untuk keperluan lainnya seperti keperluan orang tua dari anak yang mendapatakan bantuan untuk pendidikan tersebut. Hal

tersebut mencerminkan belum tepatnya penggunaan dana yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat tersebut.

Berdasarkan hasil obserasi dan wawancara diatas mengenai produk menurut peneliti produk fisik yang dimiliki oleh Program Keluarga Harapan belum digunakan secara maksimal khususnya di Kecamatan Cisarua. Hal tersebut dibuktikan pada saat dilaksanakan pencairan dana, masyarakat Keluarga Penerima Manfaat meminta kepada apratur untuk membagikan bantuan tunai secara langsung dengan berbagai alasan yang dikeluhkan oleh Keluarga Penerima Manfaat selain tempat atm yang jauh, ketidak pahaman masyarakat terhadap atm menjadi salah satu penyebabnya sehingga bantuan tunai kerap diberikan secara langsung, sehingga fungsi dari kartu tersebut hanya sebagai tanda pengenal Keluarga Penerima Manfaat, hal tersebut jelas menghilangkan fungsi lainnya yaitu sebagai kartu untuk penarikan uang tunai di atm. Selain itu penggunaan dana yang belum tepat merupakan salah satu kendala yang membuat belum tercapainnya tujuan dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

4.2.3.2 Jasa yang mendukung Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Jasa merupakan suatu kegiatan yang bisa berupa pelayanan yang dilakukan dan tidak memiliki wujud. Jasa dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang dilakukan oleh kelompok atau individu dalam memberikan manfaat atau membantu seseorang, biasanya jasa diberikan dalam bentuk pelayanan, seperti yang dilakukan oleh aparatur Program Keluarga Harapan terhadap Keluarga Penerima Manfaat.

Peran jasa dalam efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua tidak kalah penting dengan peran lainnya. Dalam Program Keluarga Harapan jasa yang diberikan oleh aparatur berupa penyampian informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat, pelatihan keterampilan, pencairan dana tunai dan lain sebagainya. Hal tersebut menjelaskan bahwa peran jasa dalam efektifitas berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga jasa dikatakan hal yang menentukan dalam efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

Berikut merupakan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari Ketua Program Keluarga Harapan mengenai jasa.

> "Jasa yang dilakukan oleh aparatur seperti para pendamping sosial dan supervisor atau aparatur lain yang bertugas dilapangan adalah dengan memberikan pelayanan yang berupa pelatihan, menjelaskan tentang kegunaan program dan membantu memecahkan masalah sosial seperti maslah perekonomian yang dialami oleh Keluarga Penerima Manfaat."(10-07-2018).

Hal tersebut menjelaskan jasa yang diberikan oleh aparatur terhadap masyarakat penerima bantuan dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua. Jasa yang diberikan aparatur diatas tidak berupa atau terlihat secara fisik, tetapi dalam jasa yang diberikan diatas masyarakat Keluarga Penerima Manfaat diharapkan dapat menerima manfaatnya seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu masyarakat penerima manfaat.

> "Petugas dari PKH sangat membantu, karena mereka selalu memberikan solusi apabila terdapat masalah seperti masalah dalam keuangan, mereka memberi tahu cara mengelola keungan sampai cara mendapatkan penghasilan tambahan dari keterampilan yang diajarkan pada saat diadakan pertemuan."(30-07-2018).

Berdasarakan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Keluarga Penerima Manfaat sangat terbantu dengan adanya apartur yang sering

memberikan solusi dan pemecahan masalah pada setiap kegiatan baik saat pelatihan atau sosialisasi yang diadakan secara rutin oleh aparatur Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

Berdasarkan uraian diatas yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan apratur dan masyarakat dapat dijelaskan secara garis besar jasa yang diberikan oleh aparatur berjalan cukup efektif. Jasa dikatakan berjalan cukup efektif karena masyarakat merasakan dampak atau perubahan atas arahan dan pelatihan yang telah diberikan oleh aparatur, hal tersebut mampu memberikan manfaat kepada masyarkat dan membantu masyarakat keluar dari permasalahan yang dihadapi seperti dalam perekonomian kehidupan sehari-hari.

Hasil mengenai Efektifitas Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua dilihat dari produk dan jasa, belum berjalan dengan efektif. Produk fisik yang berupa kartu keluarga sejahtera yang berfungsi sebagai tanda anggota penerima bantuan dan alat untuk menarik uang tunai di atm tidak digunakan sesuai fungsinya, hal tersebut terbukti pada saat pembagian bantuan tunai apratur memberikan uang secara langsung kepada masyarakat. Selain penggunaan dana yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat belum digunakan sesuai dengan masing-masing ketegotri penerima bantuan.

4.2.4 Produktifitas dalam Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Produktifitas dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu ukuran, atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai *ratio* dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Atau sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja aparatur Program Keluarga Harapan Terdapat tiga dimensi yang termasuk kedalam produktivitas yaitu, pendidikan merupakan landasan dasar untuk mempersiapkan, membina dan mengembangkan kemampuan aparatur Program Kelurga Harapan agar memilki kemampuan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat penerima bantuan keluarga harapan.

Motivasi adalah suatu aktivitas dalam memberikan semangat bekerja kepada aparatur Program Keluarga Harapan untuk terus meningkatkan kinerja kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan khususnya di Kecamatan Cisarua. Pendapatan adalah suatu penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas tenaga atau pikiran yang telah dikeluarkan untuk orang lain baik dalam bentuk uang maupun fasilitas. Pemberi bantuan Program Keluarga Harapan khususnya di Kecamatan Cisarua bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan.

4.2.4.1 Pendidikan Aparatur yang menunjang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Pendidikan merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap aparatur, karena pendidikan merupakan suatu proses untuk merubah seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan berperan sebagai landasan untuk membentuk

seseorang kedepannya, pendidiakan dapat mengembangkan kemampuan seseorang dan membina seseorang menjadi lebih baik. Aparatur Program Keluarga Harapan merupakan individu yang terpilih, dana salah satu kriterianya adalah latar pendidikan aparatur, karena pendidikan aparatur dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya seseuai dengan jabatan yang ditempatinya. Apabila latar pendidikan aparatur tidak sesuai dengan tugas yang akan dijalankannya tentu aparatur tersebut tidak dapat memberikan kinerja yang maksimal karena tidak sesuai antara tugas dan kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur Program Keluarga Harapan mengenai pendidikan aparatur adalah sebagai berikut:

> "Pendidikan aparatur merupakan salah satu hal yang penting, karena latar pendidikan dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi aparatur dalam memberikan kontribusi pada program ini, maka dari itu kami memilih aparatur dengan tingkat pendidikan minimal D3 dan latar pendidikan disesuaikan dengan posisi yang akan ditempatinya."(10-07-2018).

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dari aparatur dapat berpengauh terhadap kontribusi yang diberikan dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

Tabel 4.4

Pendidikan Aparatur Program Keluarga Harpan di Kecamatan Cisarua

No	Jabatan	Latar Pendidikan	Jumlah
1	Kordinator	S1	1
2	Supervisor	S1	1
3	Apd/Operator	S1	1
4	Pendamping	D3	7

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat aparatur yang menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan merupakan aparatur yang memiliki tingkat pendidikan dan latar pendidikan sesuai dengan jabatannya, hal tersebut diharapkan aparatur dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada saat menjalankan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

Hasil obsevasi dan wawancara yang diuraikan diiatas mengenai pendidikan aparatur dapat disimpulkan jika dilihat dari tingkat pendidikan dan latar pendidikan masing-masing aparatur cukup baik. Latar pendidikan yang sesuai dengan profesi yang dikerjakan berpeluang lebih memberikan kontribusi yang positif terhadap efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua. Karena apabila jabatan yang diduduki oleh aparatur tidak sesuai dengan latar pendidikan yang dimilikinya hal tersebut dapat berdampak kurang maksimal karena apratur tersebut belum memahi tugas dan tanggungjawabbnya dengan baik sehingga aparatur tersebut membutuhkan banyak waktu untuk mempelajarinya sehingga akan berdampak kepada efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

4.2.4.2 Motivasi yang menunjang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Motivasi adalah suatu aktivitas dalam memberikan semangat bekerja kepada aparatur Program Keluarga Harapan untuk terus meningkatkan kinerja kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan khususnya di Kecamatan Cisarua. Apabila aparatur pelaksana program memiliki motivasi yang baik dalam bekerja maka hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam

pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua. Motivasi dalam bekerja dapat diperoleh dari diri sendiri ataupun orang lain, lingkungan sekitar juga mampu mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Hubungan yang terjalin antar aparatur dan masyarakat penerima bantuan juga dapat mempengaruhi motivasi seseorang, apabila salah satu aparatur memiliki kendala aparatur lainnya diharapkan dapat memberikan solusi dan meningkatkan kembali motivasi agar dapat bekerja secara maksimal.

Motivasi yang dimiliki oleh masing-masing aparatur jelas berbeda-beda tergantung dari kebiasaan dan acuan dari dalam diri aparatur tersebut. Aparatur yang memiliki motivasi yang tinggi biasanya merupakan aparatur yang memiliki pandangan ingin maju dan memaksimalkan setiap pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan adapula aparatur yang kurang memiliki motivasi dalam bekerja hal tersebut bisa terjadi karena adanya permasalahan dan tekanan yang dihadapi baik dari lingkungan kerja atapun keluarga.

Peneliti melakukan wawancara dengan aparatur Program Keluarga Harapan mengenai motivasi aparaturnya dalam melaksanakan program:

> "Motivasi dalam bekerja tentu berbeda-beda tergantung pola pikir aparatur tersebut, ada yang tinggi biasanya aparatur yang memiliki motivasi yang tinggi adalah aparatur yang meiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan, adapula yang kurang memiliki motivasi biasanya apratur yang kurang menikmati pekerjaannya, saya selalu berusaha merubah sudut pandang aparatur yang kurang memiliki motivasi dalam bekerja dengan cara mengingatkan bahwa kita harus selalu menyukuri dan memiliki rasa tanggung jawab selain itu kita harus berfikir bahwa kerja itu merupakan seuatu ibadah maka bangkitkanlah motivasi yang ada pada diri kalian karena itu berguna bagi diri kalian sendiri dan juga orang lain."(10-07-2018).

Urain diatas merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ketua Program Keluarga Harapan dalam memberikan motivasi kepada aparatur yang melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua. Selain motivasi yang dimiliki oleh aparatur, masyarakat juga dituntut memiliki motivasi agar dapat mengubah hidupnya melalui Program Keluarga Harapan, berikut merupakan hasil wawancara dengan salah masyarkat Keluarga Penerima Manfaat. ”Mengenai motivasi tentu ada, apalagi setelah diberikan oleh petugas yang memberikan pengetahun tentang mengelola keuangan dan pelatihan keterampilan dari situ saya berfikir saya harus bisa berubah”.(30-07-2018).

Berdasarkan hal tersebut masyarakat juga memiliki motivasi yang kuat untuk dapat berubah, misalnya pada saat diadakan pertemuan kegiatan seluruh anggota masyarakat dalam masing-masing kelompok selalu menghadiri kegiatan, hal tersebut mencerminkan adanya motivasi yang tinggi untuk berubah. Berdasarkan penjelasan diatas, motivasi yang baik tidak hanya harus dimiliki oleh aparatur saja tetapi juga harus dimiliki oleh masyarkat Kelurga Penerima Manfaat karena apabila masyarkat tidak memiliki motivasi untuk maju dan berubah maka masyarakat tersebut tidak akan dapat keluar dari zona yang sedang menimpanya seperti keterbatasan dalam perekonomian dan tidak akan terwujudnya tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu membuat masyarakat memiliki kehidupan yang sejahtera dan memutus rantai kemiskinan khususnya di Kecamatan Cisarua.

4.2.4.3 Meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menunjang Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua.

Pendapatan adalah suatu penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas tenaga atau pikiran yang telah dikeluarkan untuk orang lain baik dalam bentuk uang maupun fasilitas. Aparatur pelaksana Program Keluarga Harapan dituntut untuk mampu meningkatakan pendapatan masyarakat Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Cisarua. Pendapatan yang didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat tidak boleh tergantung dari pemberian yang diberikan oleh pemerintah saja tetapi juga harus mampu mengembangkan uang yang didapatkan tersebut untuk menjadi sumber pendapatan lainya. Untuk mewujudkan hal tersebut aparatur memiliki peran yang penting, berikut merupakan hasil wawancara dengan aparatur yang bertugas di Kecamatan Cisarua mengenai meningkatkan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat.

> "Salah satu kegiatan yang sering kami adakan dalah pertemuan selain memberikan informasi terkait program kami juga memberikan pelatihan berupa pengelolaan dana dan keterampilan, kami harap masyarkat mampu mendapatkan penghasilan tambahan setelah mengembangkan kemampuannya".(23-07-2018).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aparatur memberikan cara atau jalan keluar untuk permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Kelurga Penerima Manfaat yaitu mendapatkan sumber penghasilan dengan mengembangkan bantuan tunai yang diterima sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok atau individu. Berikut merupakan

wawancara dengan salah satu anggota masyarakat Penerima Bantuan Mengenai meningkatkan pendapatan:

> ”pada saat pertemuan kami pernah disuruh untuk menyisihkan sebagian uang untuk dikumpulkan perkelompok, uang tersebut digunakan untuk modal usaha kelompok, seperti kelompok saya yang membuat usaha menjual tanaman hias, dimana uang yang dikumpulkan dibelikan bibit kemudian kami rawat dan kami jual”.(30-07-2018).

Berdasarkan pernyataan dari salah satu masyarakat penerima bantuan mengenai meningkatkan pendapatan, dapat disimpulkan masyarakat sudah mulai mampu menggunakan uang secara maksimal contohnya uang yang disisihkan sudah bisa dikembangkan menjadi usaha kecil-kecilan, dimana hal tersebut merupakan hal yang positif untuk meningkatkan pendapatan yang didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Cisarua. Terbukti menurut data Kabupaten Bandung Barat penerima bantuan program keluarga harapan khususnya di Kecamatan Cisarua dari tahun ke tahun ada sebanyak 140 ribu lebih warga RTSM yang menyatakan diri keluar dari penerima program keluarga harapan karena warga tersebut sudah mampu dan mandiri.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas yang didapatkan peneliti mengenai meningkatkan pendapatan, hal tersebut sudah berjalan dengan baik, karena masyarakat sudah mampu mengembangkan uang tersebut menjadi modal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat Keluarga Penerima Manfaat. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan aparatur dalam memberikan keterampilan dan mengembangkan pola pikir masyarakat sehingga dapat berdampak kepada efektifitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua dan mencapai tujuan atas diadakannya program ini

yaitu mengurangi angka kemiskinan dan memutuskan rantai kemiskinan khususnya di Kecamatan Cisarua.

Produktifitas dalam Efektifitas Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua dilihat dari pendidikan aparatur, motivasi dan pendapatan, masih berjalan kurang efektif. Motivasi yang diberikan oleh Ketua Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bandung Barat belum berdampak kepada seluruh aparatur khususnya yang bertugas di Kecamatan Cisarua.